



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S2 Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan										
Kapita Selekta Hukum Tata Negara	7410802024		T=2	P=0	ECTS=4.48	2	30 Januari 2025										
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi											
	Dr. Hananto Widodo				Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.											
Model Pembelajaran	Case Study																
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																
	CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan															
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan															
	CPL-5	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori dan filsafat hukum															
	CPL-12	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori;															
	CPL-18	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan															
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																
	CPMK - 1	Memahami Hukum Tata Negara dan Konstitusi															
	Matrik CPL - CPMK																
		CPMK	CPL-2	CPL-3	CPL-5	CPL-12	CPL-18										
	CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓											
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																	
	CPMK	Minggu Ke															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deskripsi Singkat MK	Kapita Selekta Hukum Tata Negara" merupakan mata kuliah lanjutan yang dirancang untuk mendalami konsep, prinsip, dan aplikasi dalam hukum tata negara. Kursus ini memberikan pemahaman mendalam tentang struktur pemerintahan, prinsip-prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan isu-isu kontemporer dalam hukum tata negara. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari aspek internasional dari hukum tata negara dan dampaknya terhadap tingkat nasional																
Pustaka	Utama :																
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Moh. Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2010. 2. 2. Nimatul Huda , Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005. 3. 3. I Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2015. 4. 4. Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia Refleksi Proses Dan Prospek di Persimpangan, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013. 5. 5. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. 6. 6. Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. 7. 7. Setiawan, Benni, dkk, Pilkada dan Investasi Demokrasi, Penerbit Buku Panji, Yogyakarta, 2006. 8. 8. Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, Setara Press, Malang, 2015. 																
	Pendukung :																

		<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. UUD NRI 1945 2. 2. UU Pemilu 3. 3. UU MD3 					
Dosen Pengampu		Dr. Sulaksono, S.H., M.H. Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami Hukum Tata Negara dan Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjelaskan peran dan fungsi konstitusi dalam sistem hukum tata negara 2. menganalisis kasus konstitusi nasional 3. menganalisis isu-isu kontroversial dalam perubahan konstitusi 4. menjelaskan perubahan konstitusi dalam konteks perkembangan sosial dan politik. 	<p>Kriteria: Kriteria: Rubrik Kinerja Bentuk: Non Tes</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	<p>Case Study</p> <p>Kuliah Small Group Discussion 50</p>		<p>Materi: Peran dan fungsi konstitusi dalam sistem hukum tata negara Pustaka: Moh. Mahfud MD., <i>Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p> <p>Materi: Perubahan konstitusi dalam konteks perkembangan sosial dan politik. Pustaka: Nimatul Huda, <i>Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005.</i></p> <p>Materi: Kasus konstitusi nasional. Isu-isu kontroversial dalam perubahan konstitusi. Pustaka: Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, <i>Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum</i>, Setara Press, Malang, 2015.</p>	5%

2	Memahami Hukum Tata Negara dan Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjelaskan peran dan fungsi konstitusi dalam sistem hukum tata negara 2. menganalisis kasus konstitusi nasional 3. menganalisis isu-isu kontroversial dalam perubahan konstitusi 4. menjelaskan perubahan konstitusi dalam konteks perkembangan sosial dan politik. 	<p>Kriteria: Kriteria: Rubrik Kinerja Bentuk: Non Tes</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	<p>Case Study</p> <p>Kuliah Small Group Discussion 50</p>	<p>Materi: Peran dan fungsi konstitusi dalam sistem hukum tata negara.</p> <p>Pustaka: Moh. Mahfud MD., <i>Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p> <hr/> <p>Materi: Perubahan konstitusi dalam konteks perkembangan sosial dan politik.</p> <p>Pustaka: Nimatul Huda , <i>Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005.</i></p> <hr/> <p>Materi: Kasus konstitusi nasional. Isu-isu kontroversial dalam perubahan konstitusi.</p> <p>Pustaka: / Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, <i>Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum</i>, Setara Press, Malang, 2015.</p>	5%
---	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

3	Memahami Hukum Tata Negara dan Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjelaskan peran dan fungsi konstitusi dalam sistem hukum tata negara 2. menganalisis kasus konstitusi nasional 3. menganalisis isu-isu kontroversial dalam perubahan konstitusi 4. menjelaskan perubahan konstitusi dalam konteks perkembangan sosial dan politik 	<p>Kriteria: Kriteria: Rubrik Kinerja Bentuk: Non Tes</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Case Study</p> <p>Kuliah Small Group Discussion 50</p>	<p>Materi: Peran dan fungsi konstitusi dalam sistem hukum tata negara.</p> <p>Pustaka: Moh. Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p> <hr/> <p>Materi: Perubahan konstitusi dalam konteks perkembangan sosial dan politik</p> <p>Pustaka: Nimatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005.</p> <hr/> <p>Materi: Kasus konstitusi nasional. Isu-isu kontroversial dalam perubahan konstitusi. menjelaskan</p> <p>Pustaka: I Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2015.</p>	5%
4	Memahami Pemilu dan Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan proses penindakan pelanggaran pemilu dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu. 2. menjelaskan mengenai pengaruh teknologi dan media sosial dalam pemilu 3. menganalisis kasus pemilu nasional atau internasional yang relevan 4. menganalisis dampak pemilu terhadap struktur pemerintahan dan perubahan politik. 	<p>Kriteria: Kriteria: Bentuk: Non Tes</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Case Study</p> <p>Kuliah Small Group Discussion 50</p>	<p>Materi: proses penindakan pelanggaran pemilu dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu.</p> <p>Pustaka: Moh. Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p> <hr/> <p>Materi: teknologi dan media sosial dalam pemilu</p> <p>Pustaka: Nimatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005.</p> <hr/> <p>Materi:</p>	5%

					<p>dampak pemilu terhadap struktur pemerintahan dan perubahan politik.</p> <p>Pustaka: / <i>Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2015.</i></p> <hr/> <p>Materi: HTN Negara Amerika</p> <p>Pustaka: <i>Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia Refleksi Proses Dan Prospek di Persimpangan, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013</i></p> <hr/> <p>Materi: HTN Negara Jerman</p> <p>Pustaka: <i>Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.</i></p> <hr/> <p>Materi: HTN Negara Prancis</p> <p>Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015</i></p> <hr/> <p>Materi: HTN Negara Belanda</p> <p>Pustaka: <i>Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, Setara Press, Malang, 2015</i></p>	
5	Memahami Pemilu dan Demokrasi	1. Menjelaskan proses penindakan	Kriteria: Kriteria: Bentuk: Non Tes	Case Study	Materi: proses penindakan pelanggaran	5%

		<p>pelanggaran pemilu dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu</p> <p>2. menjelaskan mengenai pengaruh teknologi dan media sosial dalam pemilu</p> <p>3. menganalisis kasus pemilu nasional atau internasional yang relevan</p> <p>4. menganalisis dampak pemilu terhadap struktur pemerintahan dan perubahan politik.</p>	<p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	<p>Kuliah Small Group Discussion 50</p>	<p>pemilu dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu</p> <p>Pustaka: <i>Moh. Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</i></p> <hr/> <p>Materi: teknologi dan media sosial dalam pemilu</p> <p>Pustaka: <i>Nimatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005.</i></p> <hr/> <p>Materi: dampak pemilu terhadap struktur pemerintahan dan perubahan politik.</p> <p>Pustaka: <i>I Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2015.</i></p> <hr/> <p>Materi: HTN Negara Amerika</p> <p>Pustaka: <i>Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia Refleksi Proses Dan Prospek di Persimpangan, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013</i></p> <hr/> <p>Materi: HTN Negara Jerman</p> <p>Pustaka: <i>Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.</i></p> <hr/> <p>Materi: HTN Negara Prancis</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015</i></p> <p>Materi: HTN Negara Belanda</p> <p>Pustaka: <i>Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, Setara Press, Malang, 2015</i></p>	
6	Memahami Pemilu dan Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan proses penindakan pelanggaran pemilu dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu. 2. Menjelaskan mengenai pengaruh teknologi dan media sosial dalam pemilu 3. Menganalisis kasus pemilu nasional atau internasional yang relevan 4. Menganalisis dampak pemilu terhadap struktur pemerintahan dan perubahan politik. 	<p>Kriteria: Kriteria: Bentuk: Non Tes</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Case Study</p> <p>Kuliah Small Group Discussion 50</p>		<p>Materi: proses penindakan pelanggaran pemilu dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu.</p> <p>Pustaka: <i>Nimatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005.</i></p> <p>Materi: teknologi dan media sosial dalam pemilu.</p> <p>Pustaka: <i>Moh. Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</i></p> <p>Materi: dampak pemilu terhadap struktur pemerintahan dan perubahan politik.</p> <p>Pustaka: <i>I Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2015.</i></p> <p>Materi: HTN Negara Amerika</p> <p>Pustaka: <i>Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo,</i></p>	5%

						<p><i>Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia Refleksi Proses Dan Prospek di Persimpangan, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013</i></p> <p>Materi: HTN Negara Jerman Pustaka: Jimly Asshiddiqie, <i>Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.</i></p> <p>Materi: HTN Negara Prancis Pustaka: Titik Triwulan Tutik. <i>Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015</i></p> <p>Materi: HTN Negara Belanda Pustaka:</p>	
7	Memahami Hukum Tata Negara dalam Perubahan Global	<p>1. menjelaskan globalisasi dan dampaknya pada hukum tata negara</p> <p>2. menganalisis Hukum tata negara dan isu keamanan global</p>	<p>Kriteria: Kriteria: Rubrik Kinerja Bentuk: Non Tes</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Case Study Kuliah 50		<p>Materi: Globalisasi Pustaka: Moh. Mahfud MD., <i>Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</i></p> <p>Materi: Hukum tata negara dan isu keamanan global Pustaka: Nimatul Huda , <i>Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005.</i></p>	5%

8	UTS	USS	Kriteria: USS Bentuk Penilaian : Tes	USS 2 X 50		Materi: UTS Pustaka: 1. UUD NRI 1945 <hr/> Materi: UTS Pustaka: 2. UU Pemilu <hr/> Materi: UTS Pustaka: 3. UU MD3	15%
9	Memahami Hukum Tata Negara dalam Perubahan Global	1.menganalisis hukum tata negara dan penanganan krisis global 2.menganalisis Migrasi dan Keamanan Nasiona	Kriteria: Kriteria: Rubrik Kinerja Bentuk: Non Tes Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Case Study Kuliah 50		Materi: Hukum tata negara dan penanganan krisis global Pustaka: Nimatul Huda , Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005. <hr/> Materi: Migrasi dan Keamanan Nasiona Pustaka: Moh. Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2010.	5%
10	Memahami Hukum Tata Negara dalam Perubahan Global	1.menganalisis hukum tata negara dan penanganan krisis global 2.menganalisis Migrasi dan Keamanan Nasiona	Kriteria: Kriteria: Rubrik Kinerja Bentuk: Non Tes Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Case Study Kuliah 50		Materi: Hukum tata negara dan penanganan krisis global Pustaka: Nimatul Huda , Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005. <hr/> Materi: Migrasi dan Keamanan Nasiona Pustaka: Moh. Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2010.	5%

11	Memahami isu-isu kekinian perihal Hukum ketatanegaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Hak Asasi Manusia dan Pengungsi 2. Menjelaskan hukum tata negara darurat 3. Menjelaskan meaningful participation dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 	<p>Kriteria: Kriteria Produk</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Case Study Kuliah 50	<p>Materi: Hak Asasi Manusia Pustaka: Moh. Mahfud MD., <i>Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p> <p>Materi: Hukum tata negara darurat Pustaka: Nimatul Huda, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005.</p> <p>Materi: Penyusunan peraturan perundang-undangan Pustaka: Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, <i>Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum</i>, Setara Press, Malang, 2015.</p> <p>Materi: Konsep meaningful participation Pustaka: Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, <i>Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum</i>, Setara Press, Malang, 2015.</p>	5%
----	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

12	Memahami isu-isu kekinian perihal Hukum ketatanegaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Hak Asasi Manusia dan Pengungsi 2. Menjelaskan hukum tata negara darurat 3. Menjelaskan meaningful participation dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 	<p>Kriteria: Kriteria Produk</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Case Study Kuliah 50	<p>Materi: Hak Asasi Manusia Pustaka: Moh. Mahfud MD., <i>Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p> <p>Materi: Hukum tata negara darurat Pustaka: Nimatul Huda, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005.</p> <p>Materi: Penyusunan peraturan perundang-undangan Pustaka: I Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, <i>Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum</i>, Setara Press, Malang, 2015.</p> <p>Materi: Konsep meaningful participation Pustaka: I Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, <i>Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum</i>, Setara Press, Malang, 2015.</p>	5%
----	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

13	Memahami isu-isu kekinian perihal Hukum ketatanegaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan oligarkhi dalam tata pemerintahan 2. Menjelaskan Isu-isu yang terkait dengan otonomi daerah 3. Menjelaskan isu Independensi Kekuasaan Yudikatif 	<p>Kriteria: Kriteria Rubrik Unjuk Kerja</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kriteria Rubrik Unjuk Kerja 50		<p>Materi: Definisi dan jenis oligarki Pustaka: Moh. Mahfud MD., <i>Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p> <hr/> <p>Materi: Oligarki dalam hukum tata negara Pustaka: Nimatul Huda, <i>Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo</i>, Jakarta 2005.</p> <hr/> <p>Materi: Hubungan pemerintah pusat dan daerah Pustaka: Moh. Mahfud MD., <i>Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p> <hr/> <p>Materi: Pemisahan kekuasaan Pustaka: Moh. Mahfud MD., <i>Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p> <hr/> <p>Materi: Asas dan Prinsip Independensi Yudikatif Pustaka: Moh. Mahfud MD., <i>Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p>	5%
----	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

14	Memahami isu-isu kekinian perihal Hukum ketatanegaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan oligarkhi dalam tata pemerintahan 2. Menjelaskan Isu-isu yang terkait dengan otonomi daerah 3. Menjelaskan isu Independensi Kekuasaan Yudikatif 	<p>Kriteria: Kriteria Rubrik Unjuk Kerja</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Case Study 50		<p>Materi: Definisi dan jenis oligarki</p> <p>Pustaka: Moh. Mahfud MD., <i>Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p> <hr/> <p>Materi: Oligarki dalam hukum tata negara</p> <p>Pustaka: Nimatul Huda, <i>Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo</i>, Jakarta 2005.</p> <hr/> <p>Materi: Hubungan pemerintah pusat dan daerah</p> <p>Pustaka: Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, <i>Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia Refleksi Proses Dan Prospek di Persimpangan</i>, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013</p> <hr/> <p>Materi: Pemisahan kekuasaan</p> <p>Pustaka: I Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, <i>Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum</i>, Setara Press, Malang, 2015.</p> <hr/> <p>Materi: Asas dan Prinsip Independensi Yudikatif</p> <p>Pustaka: Moh. Mahfud MD., <i>Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p>	5%
15	Memahami isu-isu kekinian perihal Hukum ketatanegaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan oligarkhi dalam tata pemerintahan 2. Menjelaskan 	<p>Kriteria: Kriteria Rubrik Unjuk Kerja</p> <p>Bentuk Penilaian :</p>	Case Study 50		<p>Materi: Definisi dan jenis oligarki</p> <p>Pustaka: Moh. Mahfud MD.,</p>	5%

		<p>Isu-isu yang terkait dengan otonomi daerah</p> <p>3. Menjelaskan isu Independensi Kekuasaan Yudikatif</p>	<p>Aktifitas Partisipasif</p>			<p><i>Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2010.</p> <hr/> <p>Materi: Oligarki dalam hukum tata negara Pustaka: <i>Nimatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005.</i></p> <hr/> <p>Materi: Hubungan pemerintah pusat dan daerah Pustaka: <i>I Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2015.</i></p> <hr/> <p>Materi: Keuangan Pusat dan daerah Pustaka: <i>Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia Refleksi Proses Dan Prospek di Persimpangan, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013</i></p> <hr/> <p>Materi: Pemisahan kekuasaan Pustaka: <i>Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.</i></p> <hr/> <p>Materi: Asas dan Prinsip Independensi Yudikatif Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia</i></p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<i>Pasca Amandemen UUD 1945, Ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015</i>	
16	UAS	Kemampuan dan ketepatan dalam analisis dan penguasaan terhadap materinelitian hukum dengan baik	Kriteria: Sangat baik, baik, cukup, kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	USS 2 X 50		Materi: UAS Pustaka: 1. UUD NRI 1945 Materi: UAS Pustaka: 2. UU Pemilu Materi: UAS Pustaka: 3. UU MD3	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	77.5%
2.	Tes	22.5%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 2 Desember 2024

Koordinator Program Studi S2
Hukum



Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.
NIDN 0027126003

UPM Program Studi S2 Hukum



Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.
NIDN 0007088801

VALID